

Vol. 2

Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

PRESIDENSI G20 INDONESIA

Laporan Utama
G20 : Apa dan Bagaimana

Sudut Pandang
Presidensi G20 Jadi Langkah Garuda Untuk Terbang



Baca artikel lainnya di www.gemakeadilan.com

G'KERS



Salam semangat juang pers mahasiswa!

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 merupakan suatu kehormatan bagi bangsa Indonesia. Disamping kewajiban melaksanakan pertemuan ini dengan sukses dan lancar, Presidensi Indonesia dalam G20 juga menjadi nilai jual tinggi untuk memperoleh kepercayaan dari dunia luar termasuk penanaman modal dan investasi meski situasi masih dalam pandemi Covid-19. Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20 sekaligus wakil satu-satunya dari ASEAN dalam mengemban tugas dan tanggung jawab tersendiri dalam memajukan perekonomian. Oleh karena itu, sebagai penyelenggara Indonesia perlu memberikan citra yang baik kepada para peserta G20.

Replik Volume 2 mengangkat tema Presidensi G20 Indonesia dengan harapan dapat menambah wawasan terkait alur dari Presidensi G20, agenda dari pelaksanaan G20 itu sendiri, serta tanggung jawab besar dan manfaat apa yang dimiliki Indonesia sebagai tuan rumah tahun ini. Sehingga sebagai warga Indonesia kita tidak hanya berbangga, melainkan juga paham dengan kesempatan emas ini. Selain itu, diangkat pula isu seputar banjir rob yang melanda Semarang beberapa waktu lalu serta pencanangan Mahkamah Mahasiswa oleh SM Undip.

Terbit dan sampainya Replik ini di tangan pembaca tidak luput dari berkat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada reporter, artistik, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kontribusinya dalam pembuatan Replik Vol. 2. Akhir kata, selamat membaca tulisan-tulisan dalam Replik Vol. 2 yang mungkin memiliki banyak kekurangan serta jauh dari kata sempurna, sehingga memerlukan kritik dan saran dari seluruh pembaca. Semoga Replik Vol. 2 ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Redaktur Pelaksana Replik
Dwi Puspita Sari

Struktur Organisasi

Pembina Mochammad Azhar, S.H.,
LLM.

Dewan Redaksi Taufikh Hidayat,
Alya Sani, Syafira Qatrunnada, Ayu
Putri, Febriani Dwi, Nabilah Deizi,
Leonard Marcel, Febri Manista

Pemimpin Umum Muhammad
Ridho

Sekretaris Umum Firnanda Anggie
Bendahara Umum Vanessa Kristina

Pemimpin Redaksi Adri Siregar

Sekretaris Redaksi Rindu

Redaktur Pelaksana Artistik Aqila

Staf Artistik Carissa, Fadhila,
Faustina, Jihara

Redaktur Pelaksana GKTV Rayhan

Staf GKTV Faizal, Raysa

Redaktur Pelaksana Infografis

Galuh

Staf Infografis Oriyah, Shella

Redaktur Pelaksana Jurnal Widya

Redaktur Pelaksana Majalah

Naura, Witra

Redaktur Pelaksana Media Online

Nilam, Vanya

Staf Media Online Agis, Caca,

Atmakeno, Syifa, Putri

Redaktur Pelaksana Tabloid

G'Corner Nazwa, Maulisna

Redaktur Pelaksana Replik Ita

Pemimpin PSDM Adriel Benedict

Staf PSDM Adrian, Alifannisa,

Bunga, Chaterine, Fikri, Kevin,

Neyssa, Rasyid, Welly, Ester, Savita,

Nadia, Poltak, Robby, Putri, Salma,

Devi, Yogi, Dhea, Defranna

Pemimpin Perusahaan Faradisya

Diandra Putri

Manager Rumah Tangga

Keuangan Devania Allyssa

Manager Iklan dan Promosi

Maritza Adena

Manager Produksi dan Distribusi

Aliyya Hana

Staf Perusahaan Wardah, Aprisa,

Salfa, Nora, Hafizah, Harani, Rusydi,

Devina, Aura

Pemimpin Humas Ega

Kustiarahma

Sekretaris Humas Naufal

Bendahara Humas Setya

Kasubdiv Internal Rizqi

Staf Internal Alya, Febi, Vinny,

Vischa, Nasywa, Devio, Audy

Kasubdiv Eksternal Syifa

Pramadina

Staf Eksternal Dina, Jofana, Ria,

Valen, Putri, Adi, Tiolina, Siti

Pemimpin Litbang M. Rakha

Farras

Kasubdiv Riset dan Kajian Brian

Staf Riset dan Kajian Erina,

Naufal, Bintang, Farozdaq, Sekar,

Nur Sopiah, Syifa, Intan, Rayhan,

Rose

Kasubdiv Survei dan Olah Data

Lerry

Staf Survei dan Olah Data Asri,

Salwa, Maheza, Agatha, Siska, Isna,

Devita

Daftar Isi

- 01** **Laporan Utama**
G20: Apa dan Bagaimana
- 05** **Laporan Khusus**
Pulih Bersama dengan Presidensi G20 Indonesia
- 08** **Kupas Tuntas**
Panggung Besar Indonesia melalui G20
- 10** **Sudut Pandang**
Presidensi G20 Jadi Langkah Garuda Untuk Terbang
- 13** **Angkat Suara**
Mahkamah Mahasiswa: Canangan Lembaga yang Tak Kunjung Ada
- 16** **Pojok Semarang**
Banjir Rob, Pengunjung Tetap Kota Semarang

G20 : APA DAN BAGAIMANA



Indonesia G20 Presidency
**Recover Together
Recover Stronger**

<httpswww.kemenkeu.go.idpublikasiberitamenu-tekankan-tiga-pilar-pada-presidensi-g20-tahun-2022>

Sebelum membahas lebih mendalam mengenai G20, tentunya harus mengetahui pengertian dari G20 itu sendiri. G20 merupakan suatu forum yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang utama di dunia. Istilah G20 merupakan singkatan dari *The Group of Twenty*, ini dikarenakan negara yang tergabung dalam G20 berjumlah 20. G20 menyelenggarakan pertemuan puncak tahunan dengan melibatkan kepala negara dan pemerintahan. Selain itu, G20 juga merupakan bentuk perwakilan lebih dari 60 persen populasi di bumi, 75 persen perdagangan global, 80 persen ekonomi, dan Produk Domestik Bruto (PDB) di dunia. Tujuan didirikannya G20 yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif. Forum ini berupaya untuk membahas solusi dan keadaan ekonomi global yang terkena dampak krisis keuangan tahun 1997-1999 dengan melibatkan negara-negara

berpenghasilan menengah dengan implikasi ekonomi sistemik.

G20 dibentuk sejak 1999 sebagai forum yang menjadi penghubung antara negara maju dan berkembang untuk menghadapi tantangan perekonomian global di abad ke-21. Sama halnya seperti yang tercantum dalam buku *Kamus Hubungan Internasional dan Hubungan Diplomasi* karya Khasan Ashari (2020), awalnya G20 dibentuk sebagai forum komunikasi. Forum tersebut memiliki tujuan untuk merespons krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir 1900-an. Dikarenakan berjalan dengan strategis, G20 menjadi komite pengarah perekonomian dan pembangunan global hingga saat ini.

Awal sejarah terbentuknya forum ini tidak terlepas dari rasa kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi permasalahan ekonomi global yang dihadapi saat itu. Anggota G7 sendiri terdiri

atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Pada awalnya, sekitar tahun 1999 atas saran dari Menteri Keuangan G7, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 mulai menyelenggarakan sebuah pertemuan untuk membahas krisis keuangan global tahun 1997-1999. Selanjutnya, pada tanggal 14-15 November 2008, Presiden Amerika Serikat George W. Bush, mengundang para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20 untuk pertama kalinya. Pertemuan itu dilaksanakan untuk melakukan koordinasi dan perundingan dalam menghadapi dampak krisis keuangan yang saat itu tengah terjadi di Amerika Serikat.

Pada tanggal 1-2 April 2009, perundingan dilanjutkan. Para pemimpin negara G20 memutuskan untuk kembali melakukan pertemuan dengan London sebagai tuan rumah (Presidensi) KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown. Pertemuan KTT G20 ketiga kembali dilaksanakan di Pittsburg pada tanggal 24-25 September 2009 di bawah koordinasi Presiden Amerika Serikat Barrack Obama kemudian berlanjut lagi pada KTT G20 keempat yang diadakan di Toronto pada tanggal 26-27 Juni 2010 di bawah koordinasi Perdana Menteri Kanada Stephen Harper. Pada tahun yang sama, KTT Seoul juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Lee Myung-Bak sebagai pemimpinnya tanggal 11-12 November 2010.

Sejak saat itu, G20 menjadi forum global yang semakin prestisius. KTT selanjutnya dilaksanakan secara berurutan di Cannes, Prancis (2011); Los Cabos, Mexico

(2012); St. Petersburg, Rusia (2013); Brisbane, Australia (2014); Antalya, Turki (2015); Hangzhou, RRT (2016); Hamburg, Jerman (2017); Buenos Aires, Argentina (2018); dan Osaka, Japan (2019). Maka dari itu, setiap tahunnya para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menyelenggarakan pertemuan beberapa kali dalam setahun untuk menyiapkan KTT ini.

Dilansir dari buku *Indonesia Incorporated* karya Zaynur Ridwan, G20 beranggotakan negara-negara dengan tingkat perekonomian yang besar dan diwakili oleh kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentralnya. Sebanyak 20 negara yang berpartisipasi akan dibagi ke dalam lima grup, adapun setiap tahunnya, salah satu anggota dari grup yang digilir akan mendapatkan kesempatan sebagai ketua G20. Agenda dari G20 dikoordinasikan oleh "Troika" atau disebut tiga pihak, meliputi ketua sebelumnya, ketua saat ini, dan ketua mendatang. Adapun anggota G20 terdiri dari:

1. Afrika Selatan
2. Amerika Serikat
3. Arab Saudi
4. Argentina
5. Australia
6. Brasil
7. India
8. Indonesia
9. Inggris
10. Italia
11. Jepang
12. Jerman
13. Kanada
14. Meksiko
15. Republik Korea
16. Rusia
17. Prancis



<https://images.app.goo.gl/LiY41vJ5ezUXvvti7.jpeg>

18. Tiongkok
19. Turki
20. Uni Eropa

Uniknya, G20 tak memiliki sekretariat permanen yang digunakan untuk pertemuan yang tetap seperti forum dan organisasi lainnya. Penentuan tuan rumah atau negara yang akan digunakan sebagai tempat pertemuan ditetapkan melalui KTT. Dalam hal ini, beberapa ketentuan wajib dilaksanakan dengan tujuan agar kawasan yang akan dijadikan tuan rumah ini nantinya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta lancar, begitu pula dengan pertemuan dalam menentukan tuan rumah tiap tahunnya. Oleh karena itu, koordinasi antara presiden yang sudah pernah menjadi tuan rumah dengan presiden yang belum pernah menjadi tuan rumah juga dibutuhkan demi kerjasama yang berhubungan dengan pelaksanaan agenda rutin dalam G20.

G20 dianggap menjadi forum yang begitu strategis, dilihat dari perwakilannya yang memiliki pengaruh besar ke seluruh

dunia. Misalnya, sebuah kebijakan moneter maupun fiskalnya yang akan berpengaruh pada sebuah efek yang disebut efek spillover atau rambatan. Jika sebuah perekonomian m e m a s u k i pertumbuhan yang tinggi, maka ekonomi dunia juga akan tumbuh tinggi, dengan demikian ekspor juga

akan berkembang. Jika ekonomi tumbuh, maka dampak yang ditimbulkan juga akan berpengaruh kepada dunia, seperti penerimaan negara, penerimaan pajak, bea cukai hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP), ini dikarenakan jika ekonomi dunia membaik, maka komoditas juga akan naik dan ekspor meningkat.

Selain pengaruh yang dibawa besar, peran nyata G20 dapat dilihat dalam beberapa kegiatan seperti:

1. Penanganan Krisis Keuangan 2008

Kesuksesan terbesar dari G20 ini ialah mengatasi krisis keuangan global yang terjadi pada 2008. G20 saat itu memberikan identifikasi yang mana bukan hanya menganggap krisis sistem keuangan global namun juga sebagai krisis ekonomi yang pencakupannya luas serta penanganan yang dibutuhkan bersifat menyeluruh, yang mana permasalahan ini terjadi di lingkup lapangan kerja serta output riil. Bidang-bidang lainnya yang bukan dalam cakupan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral juga terkena krisis ini. Adapun cara mengatasi hal ini menurut

G20, yaitu dengan melaksanakan stabilisasi sistem keuangan dan juga pengatasan atas resesi yang terjadi, serta pengembalian pertumbuhan global.

2. Kebijakan Pajak

G20 telah memacu *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak. Saat ini, beberapa agenda yang telah dijadwalkan guna pembahasan mengenai perpajakan internasional diantaranya ialah mempercepat implementasi konsensus global yang berhubungan dengan jalan keluar permasalahan perpajakan yang ditimbulkan oleh digitalisasi ekonomi OECD dan G20, membimbing negara berkembang dengan cara penerapan insentif pajak serta kebijakan perpajakan untuk pemulihan pasca pandemi Covid-19, dan pengarahan bagaimana kontribusi yang dianggap potensial serta skema karbon baru.

3. Kontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19

G20 juga berperan dalam beberapa penanganan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hal itu mencakup penanguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah, Injeksi penanganan Covid-19 sebanyak >5 triliun USD (*Riyadh Declaration*). Selain itu, ada juga penurunan/penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, *hand sanitizer*, disinfektan, alat medis dan obat-obatan.

4. Isu lainnya

Tidak hanya itu, G20 juga berperan dalam isu internasional lainnya, termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Negara Indonesia telah menerima Presidensi G20 dari Italia pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Dengan ini, presidensi G20 Indonesia dimulai tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan serah terima presidensi berikutnya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada akhir tahun 2022. Melalui kelompok G20, untuk saat ini ada tiga masalah yang diutamakan untuk dibahas yakni aksesibilitas, optimalisasi teknologi, serta pendanaan.

Penulis:

**Salma Agya Aprilia &
Savita Mutiara Rahma P.**



Pulih Bersama dengan Presidensi G20 Indonesia

satunya dari ASEAN dalam forum G20 ini serta merupakan salah satu dari sembilan negara berkembang. Sebagai negara penyelenggara G20, Indonesia harus memberikan citra yang baik kepada para peserta G20. Selain itu, Indonesia harus mampu memberikan optimisme kepada dunia bahwa dengan adanya G20 ini, semua sektor yang terkena dampak pandemi seperti sektor ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan akan kembali pulih. Setiap aspirasi yang disampaikan oleh para anggota G20 dapat menjadi sebuah solusi global bagi permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Melalui presidensi G20, Indonesia akan mewujudkan amanat dari Undang-undang Dasar 1945, yaitu turut serta melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tema yang diusung pada Presidensi G20 2022 adalah "*Recover Together, Recover Stronger*" dengan harapan seluruh negara akan bersama-sama saling bahu membahu, mendukung satu sama lain untuk pulih dan tumbuh lebih kuat serta berkelanjutan. Seluruh negara turut serta berkolaborasi dan bersinergi sampai tercipta sebuah strategi yang nantinya akan mampu mempercepat pemulihan pasca pandemi Covid-19. Melalui tema yang diusung kali ini, diharapkan nantinya dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, *people centered*, serta ramah lingkungan, dan

Indonesia menjadi tuan rumah atau presidensi *Group of Twenty* (G20) di tahun 2022. Sejak dibentuk pada tahun 1999, tahun ini adalah pertama kalinya bagi Indonesia menjadi pemegang kursi Presidensi G20. Serah terima presidensi dari Italia selaku presidensi 2021 kepada Indonesia telah dilaksanakan pada 31 Oktober 2021 di Roma, Italia. Indonesia akan memegang kursi presidensi G20 selama satu tahun penuh serta secara resmi rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia telah berlangsung mulai 1 Desember 2021 dan puncaknya pada KTT Bali yang akan dihelat pada tanggal 15-16 November 2022. Dilansir dari laman resmi G20 Indonesia 2022, kegiatan atau agenda pertama G20 di Indonesia adalah *First Sherpa Meeting* yang berlangsung pada 7-8 Desember 2021 di Jakarta, kemudian diikuti jadwal pertemuan lain dengan lokasi pertemuan yang berbeda-beda.

Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi presidensi G20 2022 karena Indonesia menjadi negara berkembang pertama yang menjadi tuan rumah G20. Indonesia menjadi wakil satu-

berkelanjutan. Dengan semangat untuk pulih bersama, Presidensi G20 Indonesia mempunyai peran untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi supaya lebih kuat, tangguh serta lebih siap ketika dihadapkan pada suatu krisis dan tantangan di masa depan.

Melalui tema *Recover Together, Recover Stronger* terdapat lima agenda pada pelaksanaan presidensi G20 2022, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Pertemuan Tingkat Menteri, *Deputies and Sherpa Meetings*, Pertemuan Kelompok Kerja/*Working Groups Meetings*, dan *Engagement Groups Meetings* atau pertemuan forum dialog. Agenda puncak dari Presidensi G20 adalah KTT G20. Agenda *Engagements Group Meeting* merupakan sebuah forum dialog yang menjadi bagian dari pelaksanaan G20. Terdapat sepuluh *engagement group* yang akan membahas isu yang berbeda menyesuaikan dengan bidangnya. Daftar *Engagement Group* G20 antara lain, *Business 20 (B20)*, *Civil 20 (C20)*, *Labour 20 (L20)*, *Parliamentary 20 (P20)*, *Science 20 (S20)*, *Supreme Audit Institutions 20 (SAI 20)*, *Think 20 (T20)*, *Urban 20 (U20)*, *Women 20 (W20)*, *Youth 20 (Y20)*. Selanjutnya ada agenda *Working Group*, yaitu agenda pertemuan yang diwakili oleh para ahli yang menangani isu tertentu dari perwakilan negara anggota G20.

Pembahasan isu dimulai dari tingkat teknis pada Pertemuan *Working Group* kemudian ke tingkat deputi dan kemudian ke tingkat menteri. Isu yang dibahas pada tingkat menteri lebih sederhana sehingga menyisakan poin pembahasan yang lebih ringkas dibanding pada tingkat deputi (gubernur). Dalam forum G20 ini terdapat

dua jalur pembahasan, yaitu *Finance Track* yang membahas mengenai isu di bidang ekonomi, keuangan, fiskal dan moneter, serta *Sherpa Track* yang membicarakan isu-isu terkait ekonomi non keuangan, seperti energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pembahasan pada isu *Finance Track* dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari masing-masing negara anggota, sedangkan pada isu *Sherpa Track* pembahasannya dilakukan oleh kementerian terkait pada tingkat menteri masing-masing negara anggota. *Deputies and Sherpa Meeting* adalah pertemuan yang membahas mengenai dua jalur pembahasan G20 di atas, yaitu *Finance Track* dan *Sherpa Track*. *Deputies meeting* merupakan bagian dari *Finance Track* sedangkan *Sherpa meeting* merupakan bagian dari *Sherpa Track*.

Sebelum sebuah isu dibahas pada Pertemuan Tingkat Menteri, terdapat hierarki dalam pelaksanaannya. Isu-isu terkait harus melewati proses pembahasan dari tingkat *Working Group (WG)* terlebih dahulu untuk kemudian dibahas pada tingkat Menteri. Tujuan adanya hierarki ini supaya pembahasan isu terkait dapat dibahas secara lebih optimal dan komprehensif di setiap tingkatan. Melalui mekanisme tersebut, pada akhirnya G20 akan menyepakati kesepakatan final atas berbagai kebijakan yang diambil atas isu-isu prioritas pada KTT sebagai penghujung rangkaian kegiatan.

Rangkaian pertemuan G20 dalam setiap presidensi umumnya mencakup 3-4 pertemuan tingkat *working group (WG)*, 3-4

pertemuan tingkat deputy, 2-4 pertemuan tingkat Menteri dan diakhiri dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Agenda puncak dari G20 adalah Konferensi Tingkat Tinggi G20 atau biasa dikenal dengan istilah KTT G20. Nantinya, KTT G20 akan dihadiri oleh seluruh kepala negara/pemerintahan setiap anggota G20. Sebagai puncak dari pelaksanaan Presidensi G20 Indonesia, KTT G20 akan dilaksanakan di Bali pada 15-16 November 2022. Pada KTT G20 nantinya akan menghasilkan berbagai kesepakatan-kesepakatan penting dari isu-isu yang telah dibahas.

Terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 2022 tentunya merupakan momen bersejarah yang harus dimanfaatkan sebagai peluang bagi Indonesia. Manfaat yang akan didapatkan oleh Indonesia dengan adanya Presidensi G20 ini dapat dilihat dari bidang ekonomi, pembangunan sosial dan politik. Melalui Presidensi G20 Indonesia akan menjadi sebuah momentum untuk pemulihan ekonomi domestik, ini dapat dilihat dari banyaknya delegasi dari berbagai negara anggota G20. Banyaknya rangkaian pertemuan dapat berpotensi memberi manfaat bagi perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yang akan didapatkan Indonesia yaitu meningkatnya devisa akibat banyaknya kunjungan delegasi negara G20, diperkirakan akan ada 20.988 delegasi yang akan hadir mengunjungi Indonesia. Sektor pariwisata juga akan mendapatkan angin segar setelah lesu ketika pandemi melanda. Selain itu, konsumsi domestik juga akan meningkat melalui optimalisasi peran

Usaha Mikro Menengah (UMKM), peningkatan PDB, hingga penyerapan tenaga kerja. Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara RI, dari pendekatan ekonomi, beberapa manfaat langsung yang dapat diraih Indonesia adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,7 triliun, penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun, dan melibatkan tenaga kerja sekitar 33.000 orang di berbagai sektor.

Presidensi G20 juga dapat menjadi ajang pembuktian Indonesia di kancah Internasional, bahwasanya meski di tengah pandemik, Indonesia tetap dapat mempunyai persepsi yang baik atas resiliensi ekonominya dalam menghadapi krisis. Melalui Presidensi G20, Indonesia akan menjadi salah satu pusat sorotan dunia dimana kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk menampilkan berbagai kemajuan yang telah kita capai, serta menjadi titik balik pemulihan keyakinan bagi pelaku ekonomi pasca pandemi. Adapun manfaat lain dari presidensi G20 Indonesia yaitu untuk mendapatkan kesempatan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global. Dari perspektif regional, Presidensi ini menegaskan kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi di kawasan, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang menjadi anggota G20.

Penulis:
Siska Utami

Panggung Besar Indonesia melalui G20



Sebagaimana diberitakan dalam media, pada tahun ini, Indonesia memegang Presidensi G20 yang berlangsung selama setahun penuh. Hal ini berarti Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertemuan forum G20. Adapun tema yang diusung yaitu *“Recover Together, Recover Stronger”* dimana melalui tema ini Indonesia ingin mengajak seluruh dunia agar bahu-membahu dan saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Menimbang dunia yang masih dalam tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, pasti diperlukan suatu upaya bersama dan inklusif dalam mencari solusi atau jalan keluar yang tepat dalam pemulihan situasi dan kondisi selama pandemi.

Untuk mencapai target tersebut, Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor prioritas yang juga menjadi topik utama dalam pembahasan G20 kali ini. Topik ini dinilai menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi

ekonomi berbasis digital, dan transisi energi. Topik tentang arsitektur kesehatan global berkaitan dengan penggalangan dana global, ketahanan dan standar kesehatan global yang harmonis, topik transformasi ekonomi berbasis digital nantinya akan mencakup desain ulang tata kelola ekonomi global dengan teknologi digital, sedangkan topik transisi energi berkaitan dengan dorongan terbentuknya sistem energi global yang lebih bersih dan transisi yang adil.

Terdapat tiga sub agenda yang termasuk ke dalam isu strategis, pertama yaitu arsitektur kesehatan global, diantaranya adalah membangun ketahanan sistem kesehatan global, menyelaraskan standar protokol kesehatan global guna menghasilkan peraturan yang sama dikarenakan standar protokol kesehatan yang diberlakukan selama ini berbeda di beberapa negara, dan yang terakhir yaitu mengembangkan pusat manufaktur dan pengetahuan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan merespons pandemi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan standar kesehatan global sekaligus membentuk kolaborasi yang lebih kuat. Dengan demikian, tercipta ketahanan komunitas dari potensi munculnya pandemi di masa mendatang.

Isu strategi selanjutnya yang akan dibahas dalam presidensi G20 Indonesia yaitu transformasi ekonomi berbasis digital. Dilansir dari laman www.indonesia.co.id pesatnya perkembangan digitalisasi diibaratkan seperti dua sisi mata uang, dimana di satu sisi digitalisasi berupaya untuk mempercepat pemulihan dengan konektivitas yang juga cepat. Namun, disisi lainnya digitalisasi juga menciptakan

kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat. Terlebih transformasi digital bukan hanya sebatas teknologi dan gaya hidup, tetapi juga mengatasi gap dan mempercepat keseimbangan serta mendukung pemulihan yang lebih cepat. Oleh karena itu, transformasi ekonomi digital menjadi isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia. Tujuannya ialah untuk mengamankan kemakmuran bersama di era digital.

Presidensi G20 Indonesia mendukung transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Isu ini dilaksanakan dengan mengedepankan keamanan energi, aksesibilitas dan keterjangkauan. Pada isu transisi energi, akan ada tiga bahasan yaitu akses, teknologi, dan pendanaan. Tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi berkelanjutan. Adapun tujuannya yaitu untuk memastikan keamanan energi dan memenuhi kebutuhan mendesak, sehingga mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih bersih.

Agenda G20 Indonesia terdiri dari 7 poin utama yang berfokus pada sektor kesehatan, ekonomi digital dan energi yang berkelanjutan. Ketujuh agenda tersebut merupakan wujud langkah nyata pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, antara lain *exit strategy* untuk mendukung pemulihan ekonomi yang adil, *scarring effect* yang bertujuan untuk mengatasi luka pandemi dalam jangka menengah dan panjang, sistem pembayaran digital, *sustainable finance* atau pembiayaan berkelanjutan yang memfokuskan tujuannya pada keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel,

inklusi keuangan, *international taxation* yang dilakukan untuk memformulasikan hak pemajakan terhadap keuntungan dari perusahaan-perusahaan multinasional, serta *cross-border payment* atau sistem pembayaran lintas negara. Topik-topik yang akan diusung nantinya merupakan topik yang memang sedang menjadi permasalahan berbagai negara sehingga, hal ini menunjukkan bahwa jika topik ini diusung nantinya akan mendapat jalan keluar serta solusi yang terbaik setelah bertukar pikiran dengan orang-orang dari lintas negara.

Jika disimpulkan, menjadi Presidensi G20 merupakan panggung besar bagi Indonesia, terlebih di tengah ekonomi global yang terpuruk akibat terpapar Covid-19. Penunjukkan sebagai presidensi G20 membuktikan presepsi yang baik atas ekonomi Indonesia. Presidensi G20 ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk unjuk gigi memimpin pemulihan ekonomi serta kondisi di kancah internasional. Oleh karenanya, Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar nantinya dimata dunia Indonesia merupakan negara yang tidak dapat diremehkan.

Penulis:
Devio Nabila E. A

Presidensi G20 Jadi Langkah Garuda Untuk Terbang

Tahun ini akan menjadi peristiwa penting bagi Indonesia, representasi Garuda sebagai lambang negara benar-benar akan terwujud di akhir tahun ini dengan adanya konsolidasi yang bernafaskan persekutuan kerjasama multilateral antara beberapa negara maju dan berkembang yang menjadi anggota G20. Indonesia terpilih untuk memimpin Presidensi G20 pada akhir tahun 2021 hingga 2022 setelah adanya serah terima KTT Roma pada tanggal 30-31 Oktober 2021. Tentu hal ini akan membuat nama Indonesia bertengger di langit dunia sebagai pemimpin forum kerja sama *global*.

G20 merupakan sebuah komunitas antara beberapa negara yang merangkul banyak negara maju serta sebagian negara berkembang dengan harapan mampu meminimalisir terjadinya krisis yang berpotensi melanda Asia, Rusia, serta Amerika Latin. Lalu, apa yang membuat Indonesia mampu menjadi bagian dari keanggotaan G20? Hal ini bermula pada tahun 1999 ketika krisis yang hebat melanda Asia hingga menyebabkan iklim ekonomi Indonesia mengalami luka yang cukup parah, disusul kemerosotan rupiah serta inflasi yang hebat sehingga mengguncang stabilitas politik maupun pemerintahan di Indonesia pada masa itu. Namun, seiring



berjalannya waktu, negara kita mampu mengatasi semua permasalahan tersebut secara bertahap dengan mekanisme yang baru hingga mampu mengembalikan keseimbangan ekonomi serta stabilitas politik setahun setelahnya.

Kepiawaian Indonesia dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan ini membuat Indonesia dipandang sebagai *Emerging Economy*. Selain itu, Indonesia juga dianggap mampu menjadi delegasi Asia Tenggara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia disertai dengan beberapa pengalaman Indonesia yang berhasil melewati krisis hebat di tahun 1999 dan 2008. Sebagai Presidensi G20, Indonesia akan menentukan beberapa agenda prioritas yang akan menjadi sumbangsih peran terhadap tujuan dari dibentuk G20 itu sendiri. Berangkat dari pandemi Covid-19 yang telah banyak menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan maupun krisis bagi banyak negara, maka hal ini menjadi landasan fundamental Indonesia untuk segera mungkin untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Oleh karenanya, Indonesia mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger". Sebagai bentuk implementasi kerja sama dalam mencari

solusi atas perbaikan ekosistem negara di dunia pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi, eksekusi bidang kesehatan, serta transisi menuju energi berkelanjutan akan menjadi beberapa parameter masalah yang akan diselesaikan. Adapun agenda G20 yang telah disusun menjadi dua pembahasan besar yaitu bagian keuangan dan bagian *Sherpa*. Jalur keuangan akan diisi oleh beberapa inisiator besar yaitu Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia yang akan fokus pada pencarian obat atas permasalahan keuangan yang sedang terjadi, selain itu bagian *Sherpa* akan tetap menangani permasalahan ekonomi yang mencakup permasalahan di luar keuangan sehingga *scope* penanganan masalah akan menjadi lebih luas.

Banyak masyarakat terutama anak muda idealis yang menginginkan adanya perubahan signifikan di dunia memiliki keinginan untuk ikut berpartisipasi langsung atau sekedar memeriahkan serta mempromosikan hal ini secara masif di sosial media kepada khalayak luas. G20 juga memberikan ruang diskursus pada masyarakat baik itu pemuda, perempuan, serta entitas masyarakat lainnya untuk ikut serta menjadi partisipan *Youth 20* serta *Women 20* dan masih banyak lagi.

Hal ini akan membuka cara pandang baru dari masyarakat terhadap negara ini dengan adanya beberapa perubahan baik yang sedang terjadi dalam langkah menuju Indonesia Maju 2045. Terlepas dari hal ini, sorotan dunia terhadap Indonesia secara tidak langsung juga nantinya akan mempromosikan geografis serta keadaan sosial masyarakat lokal terhadap penduduk global yang berpotensi meningkatkan

pariwisata asing datang ke Indonesia. Walaupun G20 terdengar seperti agenda mulia dalam usaha mensejahterakan masyarakat dunia, nyatanya masih ada beberapa pekerjaan rumah bagi anggota G20 yang belum mampu direalisasikan, hingga program kerja yang belum mampu berjalan secara efektif. Salah satunya adalah perubahan iklim dunia yang tampak masih belum mampu diatasi.

Pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim ekstrim tentu akan berdampak signifikan terhadap beberapa negara yang memiliki bentang alam yang terpapar langsung oleh akibatnya, seperti kekeringan yang terjadi hingga gagal panen terhadap tanaman komoditas dunia seperti di benua Afrika dan Ukraina.

Selain itu, agenda penanganan kesehatan secara menyeluruh juga belum mampu terwujud secara maksimal terutama di negara kita sendiri, dibuktikan dengan adanya ketimpangan kepemilikan alat kesehatan di instansi rumah sakit hingga distribusi obat dan alat kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Lalu, menurut penulis ada beberapa agenda yang dirasa masih belum tepat sasaran dalam mekanisme rancangan kegiatan yang telah disusun, yaitu peningkatan sistem ketahanan keuangan dengan basis digitalisasi. Padahal, saat ini kita tahu bahwa Indonesia sedang mengalami lonjakan inflasi serta ditambah dengan adanya kenaikan harga barang-barang pokok sebagai kebutuhan primer.

Ada baiknya jika kita terlebih dahulu berfokus pada sistem produksi serta berupaya meningkatkan daya jual beli masyarakat golongan menengah dan atas

dengan membantu memperjelas siklus barang dan uang di tengah masyarakat agar dapat menekan angka inflasi sebelum kita perlahan bertransformasi menuju era digital, selain itu himbauan serta edukasi terhadap masyarakat juga dibutuhkan terlebih dahulu sebelum transformasi dilakukan. Meskipun dirasa kurang tepat, namun program yang dirancang tentu saja sebagai manifestasi kemajuan sains dan teknologi yang terjadi dewasa ini. Ambisi manusia untuk membuat hidup semakin efektif dan efisien memunculkan konsekuensi bagi peradaban untuk terus berkembang dan berubah.

Oleh karenanya, momen terpilihnya Indonesia sebagai Presidensi G20 tersebut patut diapresiasi, karena dengan hal ini nama Indonesia serta elektabilitas negara kita tentu saja akan mencuat ke permukaan dunia, dengan kepercayaan serta tugas diemban akan menjadikan Indonesia sebagai negara bermartabat dan mampu berpartisipasi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial di dunia. Namun, hal ini juga jangan dijadikan sebagai langkah akhir garuda dalam membawa nama Indonesia ke kancha dunia, selain harus meningkatkan potensi diplomatik luar negeri kedepannya, kita juga harus terus berbenah dan mengevaluasi seluruh masalah yang terjadi di dalam ruang lingkup internal negara kita.

Penulis:
Robby Ardiansyah

Mahkamah Mahasiswa: Canangan Lembaga yang Tak Kunjung Ada



Kampus seringkali disebut sebagai miniatur negara karena kehidupan yang ada di lingkungan perguruan tinggi memiliki kesamaan dengan kehidupan bernegara. Kesamaan tersebut tercermin dalam organisasi mahasiswa (ormawa) yang memiliki peraturan dasar keberlangsungan selayaknya konstitusi. Biasanya Ormawa bergerak di bidang legislatif dan bidang eksekutif dalam lingkup universitas maupun fakultas yang berbeda di setiap perguruan tinggi. Contohnya, di Universitas Diponegoro terdapat Pedoman Pokok Organisasi yang merupakan landasan konstitusi bagi Ormawa Universitas Diponegoro. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Ormawa berfungsi untuk melaksanakan peningkatan kemampuan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan. Ormawa diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.

Sistem pemerintahan Indonesia menganut teori "Trias Politica" yang dikemukakan oleh Montesquieu. Teori tersebut membagi menjadi 3 (tiga) lembaga,

yakni lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Penulis berpendapat membagi lembaga menjadi 3 (tiga) bertujuan agar setiap lembaga fokus atas tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, serta menghindari adanya tindak kesewenang-wenangan. Dalam pemerintahan Indonesia MPR, DPR, DPD dan, DPRD sebagai lembaga legislatif. Presiden dan wakilnya dibantu menteri-menterinya sebagai lembaga eksekutif. Serta Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif.

Dalam Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Undip 2017 sudah merepresentasikan teori yang dikemukakan Montesquieu tentang membagi kekuasaan dalam pemerintahan. Hal ini tercermin dalam Senat Mahasiswa sebagai ormawa yang bergerak di bidang legislatif dan Badan Eksekutif Mahasiswa yang bergerak di bidang eksekutif. Namun hal ini masih belum sempurna, karena sampai saat ini belum ada ormawa yang bergerak di bidang yudikatif dikarenakan hal tersebut akan mengakibatkan prinsip saling memeriksa dan mengimbangi tidak berjalan dengan

baik. Secara sadar atau tidak sadar wewenang memeriksa dipegang oleh Senat Mahasiswa, sehingga Senat Mahasiswa sering terlihat *over power*. Sebagai contoh, ketika kegiatan Pemira UNDIP tahun 2021, tim yudisial dibentuk oleh SM UNDIP yang terdiri dari Anggota Senat Mahasiswa baik Universitas, Fakultas, maupun Sekolah Vokasi serta 1 (satu) orang perwakilan Majelis Wali Amanat (MWA) Undip UM. Dengan sistem *Student Government* yang sedang berjalan pada saat ini, dikhawatirkan terdapat tumpang tindih kewenangan, adanya tindak kecurangan atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh mahasiswa atau ormawa, serta belum terciptanya mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*). Maka dari itu, Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro telah merencanakan kehadiran Mahkamah Mahasiswa dalam penambahan bab baru pada Rancangan Amendemen Pedoman Pokok Organisasi Kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Dalam susunan tersebut bukan hanya merencanakan kehadiran Mahkamah Mahasiswa saja, namun juga memperbaiki kecacatan dalam PPO UNDIP 2017.

Latar belakang kehadiran Mahkamah Mahasiswa yaitu agar tercipta sebuah lembaga yang sesuai fungsinya untuk melakukan fungsi menerima (melakukan penerimaan berkas perkara yang diajukan oleh pemohon), memeriksa (melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon), memutuskan (memberikan tanggapan atas permohonan yang telah diperiksa), dan mengadili (menjatuhkan kebijakan dan putusan pengadilan atas permohonan yang

telah disidangkan). Selain itu Mahkamah Mahasiswa juga melakukan pengujian dan pengawasan Perma terhadap PPO dan Garis-Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK) ormawa UNDIP.

Dengan fungsi tersebut maka Mahkamah Mahasiswa memiliki wewenang menafsirkan PPO UNDIP dan GBHK Ormawa UNDIP, menguji Perma terhadap PPO dan GBHK Ormawa UNDIP atau Peraturan Mahasiswa Fakultas terhadap PPO Fakultas dan GBHK Ormawa Fakultas atau Sekolah Vokasi terhadap PPO Sekolah Vokasi dan GBHK Ormawa Sekolah Vokasi apabila dimohonkan, menyelesaikan sengketa antar ormawa di tingkat Universitas atau Fakultas atau Sekolah Vokasi apabila dimohonkan, memutus sengketa Pemira di tingkat Universitas atau Fakultas atau Sekolah Vokasi apabila dimohonkan, serta memberikan pandangan hukum terhadap BEM UNDIP atau BEM-F atau BEM-SV atau UKM UNDIP atau UKM-F atau UKM-SV mengenai masalah status keanggotaan apabila dimohonkan. Pada tahun ini peraturan tentang Mahkamah Mahasiswa telah dimuat dalam Rancangan Amendemen PPO UNDIP 2017 pada penambahan BAB VIIA tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Diponegoro.

Sebenarnya Mahkamah Mahasiswa telah disebutkan dalam PPO Undip 2017 sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan nonstruktural Undip. Seperti penjelasan dari Putri Rahayu mahasiswa dari Fakultas Teknik (2021) berintru di BEM Fakultas Teknik "Mahkamah Mahasiswa telah disebut pada PPO UNDIP 2017, meskipun tidak ada perwujudannya sampai hari ini di UNDIP". Hanya saja belum

dijelaskan secara rinci terkait kedudukan, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Mahasiswa, akibatnya menimbulkan ketidakjelasan keberadaan Mahkamah Mahasiswa itu sendiri. Untuk memperjelas hal tersebut, Senat Mahasiswa UNDIP menjelaskan secara rinci materi muatan Mahkamah Mahasiswa dalam Rancangan Amendemen PPO UNDIP dengan tujuan agar kedudukan, fungsi, dan wewenang dari Mahkamah Mahasiswa tersebut dapat dipahami dengan jelas sekaligus menyempurnakan sistem *Student Government* di Universitas Diponegoro.

Habib Henfian selaku Ketua dari Komisi IV Senat Mahasiswa Undip 2022 menjelaskan bahwa "Perencanaan Mahkamah Mahasiswa (MM) itu sendiri melihat dari berbagai segi sudut pandang kepentingan di berbagai fakultas dan Sekolah Vokasi, UKM serta di ranah Universitas itu sendiri. Dimana MM ini sebagai lembaga yudikatif yang memiliki berbagai permasalahan di ranah Universitas dan dapat menyelesaikan di ranah Fakultas dan Sekolah Vokasi serta UKM jika memang diajukan dan diperbolehkan oleh Fakultas atau SV atau UKM itu sendiri, karena kehadiran MM ini sejatinya ialah sebagai peradilan pertama dan terakhir." Ia juga menjelaskan terkait kepastian kehadiran Mahkamah Mahasiswa, dimana kehadiran Mahkamah Mahasiswa itu dapat berjalan tahun depan melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa tahun ini dan apabila terjadi amendemen terkait PPO 2017.

Adapun Razan, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), sebagai salah satu mahasiswa yang berintraksi di BEM FISIP menyatakan bahwa, "*Pikirku* itu bisa menjadi sebuah gebrakan baru untuk menyempurnakan demokrasi dalam tubuh ormawa, namun memerlukan pengkajian dan perencanaan yang matang. Perlu ditilik pula tupoksi dari MM itu sendiri serta sistematisasi untuk pemilihan anggota," ujarnya ketika dimintai pendapat mengenai penancangan Mahkamah Mahasiswa.

Jika disimpulkan pendapat dari beberapa narasumber, Mahkamah Mahasiswa (MM) merupakan sebuah gebrakan baru di Universitas Diponegoro untuk menyempurnakan demokrasi dalam tubuh ormawa, yang mana MM tersebut sebagai peradilan pertama dan terakhir. Pada PPO 2017 MM telah disebut, namun belum dijelaskan secara rinci. Penulis beropini dengan hadirnya Mahkamah Mahasiswa dapat menyempurnakan sistem *Student Government* di Universitas Diponegoro, serta nantinya Mahkamah Mahasiswa berjalan sesuai pada kebijakan Rancangan Amendemen Pedoman Pokok Organisasi tahun 2017.

Penulis:
Poltak Binsar



Banjir Rob, Pengunjung Tetap Kota Semarang

Banjir pasang air laut atau yang dikenal dengan banjir rob menjadi bencana tiap tahun di Kota Semarang, baik di musim hujan maupun musim kemarau. Banjir rob menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan banyak masyarakat merasa resah akibat mengalami kerugian material maupun finansial. Tahun ini, terdapat setidaknya 8.000 kepala keluarga terdampak banjir rob yang melanda kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah.

Selain itu, banyak bangunan warga yang terdampak mengalami kerusakan akibat banjir pasang air laut atau banjir rob yang melanda wilayah mereka. Kelurahan Bandarharjo, Semarang, mengalami kerugian sebesar Rp16 miliar walaupun di daerah itu telah dilakukan penanganan Banjir Rob yang menghabiskan dana Rp2,5 miliar. Diketahui bahwa banjir pasang air laut ini diperparah dengan adanya

gelombang tinggi disertai jebolnya tanggul di sungai kawasan berikat Lamicitra. Banjir juga meluas ke sejumlah wilayah di Demak dan Pekalongan. Dikutip dari CNNIndonesia.com, berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir rob ini belum kunjung surut seutuhnya. Adapun sejumlah fakta dan pemicu banjir rob ialah sebagai berikut:

Pertama, siklus bulan. Thomas Djalaludin, peneliti dari Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN menjelaskan banjir rob Semarang itu terjadi pada fase perbani akhir. Fase ini merupakan salah satu fase bulan pada saat konfigurasi antara Matahari, Bumi, dan Bulan membentuk sudut siku-siku (90°) setelah fase bulan purnama.

Selain itu terdapat siklus bulan lainnya yang harus diwaspadai, yaitu siklus nodal. Saat ini terjadi, posisi bulan yang miring 5 derajat dari ekliptika (bidang orbit bumi) sehingga bulan akan menjauh atau mendekat dari ekuator (khatulistiwa). Efek dari siklus yang terjadi setiap 18,6 tahun (sekitar 18 tahun 7 bulan 6 hari) sekali itu adalah muka air laut naik dan memicu banjir rob di wilayah pesisir.

Kedua, permukaan tanah menurun. Thomas Djalaludin mengatakan, berdasarkan kajian satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), pantai utara Jawa mengalami penurunan cukup tinggi. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan BPPT pada Juni 2018, permukaan tanah di Kota Semarang turun pada rentan 2008-2009 sebanyak 12,4 cm. Angka itu meningkat di tahun 2009-2010 yaitu sebanyak 20,4 cm.

Ketiga, pemanasan global. Thomas Djalaludin melanjutkan kenaikan tinggi permukaan air laut juga dipicu oleh mencairnya es dan gunung es di kawasan kutub. Hal itu dibenarkan berdasarkan pendapat dari Dr. Bachtiar W. Mutaqin, S.Kel., M.Sc, seorang pakar geomorfologi pesisir dan laut, Universitas Gadjah Mada bahwa banjir rob disebabkan oleh adanya *global warming* berupa naiknya permukaan air laut, dan material tanah di utara Jawa yang belum solid.

Kemudian, dari hasil penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Permukiman dan Prasarana Wilayah juga menyebutkan bahwa air laut di kawasan pesisir Semarang mengalami kenaikan sebesar 5 mm setiap tahunnya akibat pemanasan global. Menurut pakar Geodesi dari ITB, Heri Andreas, angka kenaikan air laut itu tak signifikan bila dibandingkan penurunan muka tanah di kawasan pesisir pantura yang naik 6 mm -1 cm per tahun, menurut pengukuran satelit altimetri. Sementara, penurunan muka tanah pesisir di Semarang, kata Heri, mencapai 10 cm hingga 20 cm per tahun.

Dikutip dari kompas.com, Dr Dwi Sarah S.T., M.Sc, peneliti ahli muda di Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membeberkan bahwa terdapat dua solusi untuk menanggulangi banjir rob yang terjadi di Semarang yaitu solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang.

Untuk solusi jangka pendek dari kondisi tersebut adalah dengan membangun struktur penahan banjir rob seperti tanggul, serta *pump and polder system*. Sementara itu, solusi jangka panjang yaitu melalui konservasi air tanah dan *artificial recharge* air tanah dalam.

Untuk saat ini, Pemerintah Semarang berupaya menanggulangi bencana banjir rob dengan membuat peredam air atau dam, melakukan pengerukan sungai dan membuat tanggul untuk mengantisipasi adanya rob (air pasang). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadinya banjir rob di Semarang ini dipicu oleh banyak faktor, baik itu alamiah maupun non alamiah. Kita tidak dapat mencegah terjadinya fase bulan yang menjadi salah satu faktor terjadinya banjir rob namun, kita dapat turut serta mengurangi efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. Alangkah lebih baiknya lagi bagi kita untuk turut menjaga lingkungan dan aktif mendukung solusi yang dicanangkan pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir rob.

Penulis:
Aura Caesar Binary L.

LPMGEMAKEADILAN

aktif, dinamis, kritis

Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Lt.3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271

